

“Analisis Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis: Tinjauan Hukum dan Perlindungan Anak Sekolah Dasar”

Destriani Silla¹, Theresia Irnatesa Vivin², Sanctissima Trinitas Gute Kothen³,
Elisabeth Rari Basa⁴, Inriwati Ora⁵, Fadil Mas’ud⁶

¹⁻⁶ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang

Alamat e-mail : ¹destrianis972@gmail.com, ²tesavivin@gmail.com,
³ktryas73@gmail.com, ⁴elisabethraribasa29@gmail.com, ⁵inriora20@gmail.com,
⁶fadil.masud@staf.undana.ac.id,

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a government initiative aimed at improving the health and nutritional intake of elementary school students as part of an effort to support the quality of basic education in Indonesia. However, the program faces a number of challenges, particularly those related to food safety and the oversight of food distribution. Several incidents of food poisoning among elementary school students indicate that the implementation of the MBG Program has not been supported by adequate monitoring systems and food safety standards. This study aims to analyze cases of food poisoning within the MBG Program from the perspective of child rights protection, identify the causes of poisoning, and examine the responsibilities of the government and program organizers in ensuring food safety. The method used in this study is normative legal research employing a literature review approach through the analysis of legislation, scientific journals, books, and previous research. The findings indicate that food poisoning incidents are triggered by weak oversight, suboptimal food safety standards, and poor coordination among institutions. Therefore, enhanced oversight, program evaluation, and increased awareness regarding food safety in elementary school environments are necessary.

Keywords: Food Poisoning, Free Nutritious Meal Program, Child Protection, Elementary School.

ABSTRAK

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan asupan gizi bagi siswa sekolah dasar sebagai upaya untuk mendukung kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Walaupun program ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan. Beberapa insiden keracunan pangan di kalangan siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG belum didukung dengan sistem pengawasan dan standar keamanan pangan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus keracunan pangan dalam Program MBG dari sudut pandang

perlindungan hak anak, mengidentifikasi faktor penyebab keracunan, serta meninjau tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara program dalam memastikan keamanan pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan riset sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa insiden keracunan dipicu oleh lemahnya pengawasan, tidak optimalnya standar keamanan pangan, serta rendahnya koordinasi antar lembaga. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pengawasan, evaluasi program, dan peningkatan kesadaran mengenai keamanan pangan di lingkungan sekolah dasar

Kata Kunci:Keracunan Makanan, Program Makanan Bergizi Gratis, Perlindungan Anak, Sekolah Dasar.

A. Pendahuluan

Program Gizi Gratis (MBG) adalah salah satu strategi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Inisiatif ini diciptakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa agar dapat mengikuti proses belajar dengan lebih baik. Dalam dunia pendidikan dasar, pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak memiliki hubungan yang sangat penting dengan kesehatan, fokus belajar, kemampuan berpikir, serta perkembangan kognitif mereka. Kesehatan yang optimal akan berpengaruh pada kemampuan anak dalam memahami pelajaran di tingkat dasar. Oleh karena itu, pelaksanaan Program MBG tidak hanya dianggap

sebagai inisiatif kesehatan, tetapi juga sebagai langkah protektif terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan yang seharusnya (Nengsih, G., & Sommaliagustina 2025).

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak anak mengenai kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan sesuai yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan ini mencakup hak anak untuk mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan sesuai standar konsumsi, khususnya bagi siswa sekolah dasar yang merupakan kelompok usia yang rentan terhadap masalah kesehatan. Dalam implementasinya, Program MBG diharapkan mampu memberikan

jawaban atas persoalan gizi pada siswa sambil mendukung kemajuan mutu pendidikan dasar di Indonesia (Fikri 2025; Nengsih, G., & Sommaliagustina 2025). Kebijakan ini juga merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memastikan perkembangan anak agar tetap berkelanjutan sebagai penerus bangsa. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Perlindungan terhadap hak anak dalam implementasi kebijakan publik memerlukan sinergi regulasi dan pengawasan yang efisien agar tidak muncul tumpang tindih kewenangan antara lembaga. Sinergi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis, dapat dilaksanakan dengan terarah dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi peserta didik sekolah dasar (Mas'ud, Fadil, Banola et al. 2025). Di samping itu, penguatan lembaga pengawas juga dibutuhkan untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang menyangkut

kesehatan dan keselamatan anak di lingkungan pendidikan dasar.

Namun, pelaksanaan Program MBG di beberapa wilayah masih menemui sejumlah tantangan, salah satunya adalah adanya kejadian keracunan makanan pada siswa sekolah dasar. Situasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum didukung oleh pengawasan keamanan pangan yang memadai. Data dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa jumlah keracunan dalam Program MBG meningkat pada tahun 2025, yang berdampak buruk pada kesehatan ribuan siswa (CELIOS 2025a). Selain itu, laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada tahun 2026 juga mengungkap adanya kasus keracunan makanan dalam Program MBG yang menimbulkan keprihatinan masyarakat terhadap keamanan program tersebut (JPPI 2026). Hal ini menunjukkan bahwa program yang seharusnya meningkatkan kesehatan siswa sekolah dasar malah berpotensi menjadi ancaman bagi keselamatan mereka jika tidak disertai dengan pengawasan yang baik.

Selain itu termasuk dalam kategori rentan berhak mendapatkan perlindungan yang setara tanpa adanya diskriminasi dalam penerapan kebijakan publik, termasuk dalam program nutrisi di sekolah dasar (Tari, Mas'ud, Sanbret, & Abineno 2025). Pelaksanaan Program MBG juga memerlukan perencanaan yang cermat agar distribusi makanan, kualitas gizi, dan keamanan pangan dapat berlangsung dengan baik. Penilaian program menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan siswa sekolah dasar (Ramanisa 2025). Di samping itu, adanya ahli gizi juga memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan kualitas makanan dan menjamin terpenuhinya standar gizi di dalam Program MBG (Restiana 2025).

Kasus keracunan makanan dalam Program MBG mengilustrasikan adanya kesenjangan antara tujuan politik dan situasi riil di lapangan. Beberapa faktor yang diduga memicu terjadinya kasus keracunan ini termasuk lemahnya pengawasan dalam distribusi makanan, penerapan standar keamanan pangan yang tidak

optimal, serta minimnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam program tersebut. Keadaan ini menandakan bahwa perlindungan hak anak di sekolah dasar dalam konteks kebijakan publik masih memerlukan penguatan. Siswa dari tingkat dasar sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan khusus terhadap segala ancaman yang berpotensi membahayakan kesehatan (Mas'ud 2019).

Dalam perspektif hukum, isu keracunan makanan terkait Program MBG bisa dianalisis dengan pendekatan yang melindungi hak anak serta tanggung jawab negara. Sebagai pengelola kebijakan publik, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program yang diterapkan tidak membawa risiko bagi kesehatan masyarakat, khususnya siswa sekolah dasar yang merupakan penerima utama dari program tersebut. Dengan demikian, segala bentuk kelalaian dalam pelaksanaan Program MBG yang berdampak pada kesehatan siswa dapat berakibat pada sanksi hukum, baik administratif maupun pidana (Sumantri, O., & Sinaga 2024). Selain itu, pengawasan keamanan pangan juga sangat penting dalam usaha

melindungi konsumen serta hak anak dalam bidang pendidikan dasar (Zazili 2019).

Penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti Program MBG dari sudut pandang kebijakan publik, pemenuhan gizi, dan efektivitas pendidikan. Namun, analisis yang secara khusus mengkaji kasus keracunan dalam Program MBG dari sisi perlindungan hak anak sekolah dasar masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk memberikan analisis tentang bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada siswa sekolah dasar dalam pelaksanaan Program MBG, serta untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dan penyelenggara dalam memastikan keamanan pangan selama program berlangsung.

Dengan penjelasan tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada analisa keracunan yang terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis terhadap perlindungan hak anak di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi siswa sekolah dasar dan mengevaluasi tanggung jawab negara serta penyelenggara program dalam

menjamin keamanan pangan pada pelaksanaan Program MBG. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi guna memperkuat pengawasan keamanan pangan, meningkatkan kerja sama antara lembaga, serta menerapkan standar distribusi makanan yang lebih efektif pada Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, sekolah, dan pihak terkait dalam memastikan keamanan, kesehatan, dan perlindungan hak siswa di lingkungan pendidikan dasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai literatur ilmiah yang relevan terkait dengan insiden keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis, perlindungan hak anak, keamanan pangan, dan tanggung jawab negara dalam implementasi kebijakan publik di sektor pendidikan dasar. Pemilihan studi pustaka dilakukan karena penelitian ini membutuhkan eksplorasi

mendalam tentang konsep-konsep hukum, teori-teori, temuan penelitian sebelumnya, serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan perlindungan anak dan keamanan pangan dalam konteks Program MBG.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya keracunan makanan di kalangan siswa sekolah dasar, seperti kurangnya pengawasan dalam distribusi makanan, penerapan standar keamanan pangan yang belum optimal, dan rendahnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program ini. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada bagi siswa sekolah dasar, yang merupakan kelompok rentan dan berhak mendapatkan makanan yang aman dan layak di lingkungan pendidikan.

Bahan data dalam penelitian ini mencakup sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer termasuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2012 mengenai Pangan, serta regulasi lainnya yang relevan dengan kesehatan dan keamanan pangan. Sementara itu, sumber hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dan hasil riset sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian, khususnya mengenai Program Makan Bergizi Gratis, perlindungan hak anak, serta keamanan pangan di tingkat sekolah dasar.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Metode ini dilakukan dengan mengklasifikasikan, membandingkan, dan mengkaitkan berbagai temuan dari sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian tersebut. Analisis isi digunakan untuk menyusun tema-tema penelitian, seperti jenis-jenis kasus keracunan dalam Program MBG, perlindungan hukum bagi siswa sekolah dasar, tanggung jawab negara, serta langkah-langkah pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Proses analisis dokumen dilakukan melalui pembacaan sistematis, pengelompokan data, interpretasi isi dokumen, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif analitis.

Dengan pendekatan yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan yang menyeluruh mengenai kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis dan memberikan saran untuk meningkatkan pengawasan keamanan pangan serta perlindungan hak siswa sekolah dasar di lingkungan pendidikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis pada Peserta Didik Sekolah Dasar

Program Makanan Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa di tingkat sekolah dasar. Diharapkan, program ini dapat membantu proses belajar dengan memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak dari usia dini. Dalam pendidikan dasar, pemenuhan gizi sangat berkaitan erat dengan perkembangan fisik, kemampuan belajar, dan fungsi kognitif siswa. Oleh karena itu, implementasi Program MBG tidak hanya penting dari segi kesehatan,

tetapi juga berperan krusial dalam melindungi hak anak-anak di lingkungan pendidikan dasar (Nengsih, G., & Sommaliagustina 2025).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PNG di beberapa wilayah masih menghadapi beragam tantangan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan. Kejadian keracunan makanan di kalangan siswa sekolah dasar menandakan bahwa sistem pengawasan dalam pelaksanaan program belum berfungsi secara maksimal. Data dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa insiden keracunan dalam Program MBG meningkat pada tahun 2025, yang berdampak negatif terhadap kesehatan ribuan siswa (CELIOS 2025b). Selain itu, laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2026 juga mengungkapkan adanya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program MBG yang menimbulkan kekhawatiran publik akan keamanan program tersebut (JPPI 2026).

Kejadian keracunan makanan di kalangan siswa sekolah dasar mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan program dan realitas di lapangan. Program yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan siswa justru berpotensi menjadi ancaman bagi keselamatan anak jika tidak didukung dengan pengawasan keamanan pangan yang memadai. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa penyebab munculnya kasus keracunan diantaranya adalah kurangnya penerapan standar keamanan pangan yang optimal, lemahnya pengawasan penyedia makanan, dan kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam program. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak di sekolah dasar, sebagai kelompok yang rentan, memerlukan perlindungan khusus dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka (Mas'ud 2019).

Dalam konteks perlindungan hak anak, kasus keracunan dalam Program MBG menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan makanan yang aman dan sehat belum sepenuhnya terpenuhi. Perlindungan hak anak mencakup akses pendidikan, serta hak atas kesehatan

dan keselamatan di lingkungan sekolah dasar. Sebagai penyelenggara kebijakan publik, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi makanan mematuhi standar keamanan pangan dan prinsip perlindungan anak (Sumantri, O., & Sinaga 2024). Oleh karena itu, setiap kelalaian dalam penyelenggaraan Program MBG yang berdampak pada kesehatan siswa dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, baik secara administratif maupun pidana.

Di samping tanggung jawab pidana, kasus keracunan dalam Program MBG juga menimbulkan tanggung jawab administratif dan perdata. Tanggung jawab administratif menyangkut pelanggaran prosedur dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program, sedangkan tanggung jawab perdata berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh korban akibat kelalaian penyelenggara program. Pengawasan terhadap keamanan pangan menjadi elemen krusial dalam melindungi konsumen dan hak anak dalam pendidikan dasar (Zazili 2019). Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan, dan evaluasi program

secara berkala sangat penting agar pelaksanaan Program MBG dapat dilaksanakan dengan aman dan efektif untuk siswa sekolah dasar (Shientiarizki et al. 2026). Sementara itu, lembaga pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan publik berlangsung sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku (Mas'ud, Fadil, Banola et al. 2025). Ketidakefektifan dalam proses pengawasan bisa mengakibatkan timbulnya berbagai pelanggaran terhadap prosedur keamanan pangan, yang langsung berdampak pada kesehatan siswa di tingkat sekolah dasar.

Dalam pandangan hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan serta keselamatan warga, terutama anak-anak yang merupakan kelompok yang rentan. Jika pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG tidak efektif, hal ini bisa berdampak pada pelanggaran hak anak terkait kesehatan dan keamanan pangan di lingkungan sekolah dasar (Mas, Bolo, and Siki 2025).

Selain pengawasan dan distribusi makanan, hasil kajian juga mengindikasikan bahwa kesiapan infrastruktur untuk pengolahan makanan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keamanan pelaksanaan Program MBG. Beberapa sumber literatur menunjukkan bahwa pengolahan makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan berpotensi meningkatkan risiko adanya bakteri atau bahan berbahaya pada makanan yang dikonsumsi oleh murid sekolah dasar. Kondisi dapur untuk pengolahan, penyimpanan bahan makanan, serta kebersihan alat distribusi merupakan aspek penting dalam memelihara kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Apabila standar sanitasi tidak diterapkan dengan baik, risiko terjadinya keracunan makanan akan meningkat dan bisa berdampak negatif pada kesehatan peserta didik serta proses belajar di sekolah dasar.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan secara berkala terhadap penyedia makanan menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan Program MBG. Pemeriksaan yang dilakukan hanya pada awal program

tidak cukup untuk memastikan keamanan pangan dengan berkelanjutan. Dalam praktiknya, perlu adanya evaluasi rutin terkait dengan mutu bahan makanan, cara pengolahan, sampai distribusi makanan kepada murid sekolah dasar. Pengawasan yang dilakukan secara berkala sangat penting agar setiap pelanggaran pada standar keamanan pangan dapat terdeteksi dan segera diatasi sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar bagi kesehatan anak-anak. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pengawasan dalam Program MBG masih perlu diperkuat agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Di samping itu, insiden keracunan dalam Program MBG juga membawa dampak psikologis bagi peserta didik dan orang tua. Adanya rasa takut dan kekhawatiran mengenai keamanan makanan di sekolah bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah. Bagi murid sekolah dasar, pengalaman keracunan dapat menyebabkan trauma dan ketidaknyamanan dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Oleh

karena itu, penanganan kasus keracunan tidak hanya harus pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga perlu memperhatikan pemulihan kondisi psikologis peserta didik. Pemerintah dan pihak sekolah harus memberikan dukungan serta memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG di masa depan dijalankan dengan sistem pengawasan yang lebih baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut dapat kembali meningkat.

2. Upaya Perlindungan Hak Anak dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar

Perlindungan hak anak dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah elemen krusial untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan siswa sekolah dasar. Anak-anak di tingkat dasar merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perhatian khusus terkait berbagai ancaman yang dapat merugikan kesehatan serta keselamatan mereka. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak seharusnya dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang

optimal (Anut, H., Lengo, K. L., Talumbani, M. D., Toi, M. G. R., & Mas' ud 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam pelaksanaan Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan lemahnya pengawasan dalam distribusi makanan dan belum optimalnya penerapan standar keamanan pangan. Insiden keracunan makanan di kalangan siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa sistem pengawasan keamanan pangan belum berjalan seefisien mungkin. Keadaan ini menandakan bahwa perlindungan hak anak untuk mendapatkan makanan yang aman dan bergizi masih memerlukan peningkatan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Dari sudut pandang hukum, perlindungan hak anak meliputi hak atas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam konteks pendidikan dasar. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perlindungan dari segala ancaman yang bisa membahayakan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, pelaksanaan

Program MBG harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah, sekolah, dinas kesehatan, dan penyedia makanan agar keamanan pangan tetap terjaga (Sumantri, O., & Sinaga 2024). Perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang mencakup hak anak-anak, harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan setiap program pemerintah demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pelajar tetap terjamin. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk mendapatkan keamanan, kesehatan, dan perlindungan dari berbagai bentuk kelalaian dalam pelayanan publik (Mas et al. 2025). Perlindungan hak anak dalam penerapan Program MBG juga berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah. Perlindungan ini harus direalisasikan melalui sistem pengawasan yang efisien dan kebijakan yang mendukung kepentingan.

Strategi perlindungan hak anak dalam pelaksanaan Program MBG dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan

pengawasan terhadap keamanan pangan. Pengawasan preventif harus dimulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga konsumsi oleh siswa sekolah dasar. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap penyedia makanan untuk memastikan bahwa semua makanan yang diberikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko keracunan makanan dan melindungi kesehatan siswa di lingkungan sekolah dasar.

Peningkatan kolaborasi antar lembaga juga merupakan faktor krusial dalam mendukung perlindungan hak anak terkait pelaksanaan Program MBG. Pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pihak sekolah perlu bersinergi dalam melakukan pengawasan serta penanganan jika terjadi insiden keracunan makanan. Kerja sama yang baik akan mempercepat penanganan masalah dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan (Mas'ud, Fadil, Banola et al. 2025) . Selain itu, keterlibatan orang tua juga penting untuk meningkatkan pengawasan mengenai kondisi kesehatan anak

setelah menerima makanan dari program ini.

Selain dari aspek pengawasan dan kolaborasi, edukasi mengenai keamanan pangan perlu diperkenalkan kepada siswa, guru, dan masyarakat. Pengetahuan mengenai pentingnya makanan yang sehat dan aman dapat meningkatkan kesadaran semua pihak tentang perlindungan kesehatan anak. Sekolah dasar dapat berfungsi sebagai lingkungan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai hidup sehat dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan sejak dini. Dengan demikian, perlindungan hak anak dalam pelaksanaan Program MBG bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta sekolah, keluarga, dan masyarakat secara bersama.

Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa sekolah dasar memainkan peran penting dalam menciptakan budaya hidup sehat melalui implementasi Program MBG. Institusi pendidikan ini tidak hanya sekadar tempat untuk memberikan makanan, tetapi juga berfungsi sebagai arena pengajaran yang mampu menanamkan perilaku

menjaga kesehatan dan pola makan yang baik kepada para siswa. Para pendidik bisa memberikan informasi dasar mengenai pentingnya menjaga kebersihan makanan, pola konsumsi yang sehat, serta cara menjaga kesehatan diri sejak usia dini. Dengan adanya pendidikan tersebut, diharapkan anak-anak di sekolah dasar akan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan lebih selektif dalam memilih makanan yang mereka konsumsi. Penguatan lembaga pengawas sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan Program MBG berlangsung dengan akuntabilitas serta mengikuti prinsip perlindungan hak anak dalam konteks pendidikan dasar (Mas'ud et al. 2025).

Pendekatan kesetaraan sipil juga krusial dalam penerapan Program MBG agar semua siswa mendapatkan perlindungan dan layanan yang sama, tanpa adanya ketimpangan dalam akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi di sekolah dasar (Tari, Mas'ud, Dwiputra, & Istianah 2025). (Fikri 2025; Nengsih, G., & Sommaliagustina 2025)

Implementasi Program MBG juga memerlukan dukungan fasilitas yang cukup di dalam lingkungan

sekolah dasar. Keberadaan tempat penyimpanan makanan yang bersih, sanitasi yang memadai, serta lingkungan sekolah yang sehat merupakan elemen krusial dalam meningkatkan keamanan pangan bagi siswa. Jika fasilitas pendukung ini tidak tersedia secara efektif, risiko terjadinya kontaminasi makanan akan meningkat dan dapat berdampak negatif pada kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak sekolah untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang mendukung Program MBG memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan.

Selain itu, penilaian rutin terhadap program merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG di sekolah dasar. Evaluasi harus dilakukan tidak hanya pada mutu makanan, tetapi juga terhadap sistem distribusinya, efektivitas pengawasan, dan tingkat keamanan pangan yang diterapkan oleh penyelenggara. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG dan segera mengambil tindakan perbaikan. Dengan demikian,

Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lebih aman, efektif, serta berkontribusi pada perlindungan hak anak dan peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah dasar merupakan aspek krusial dalam usaha meningkatkan tingkat kesehatan dan pendidikan anak. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa sehingga dapat membantu perkembangan fisik, pemfokusan belajar, dan kemampuan berpikir anak di lingkungan pendidikan dasar. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG di sejumlah wilayah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan keamanan makanan dan pengawasan distribusi pangan. Insiden keracunan makanan yang melibatkan siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penerapan standar keamanan makanan belum diterapkan dengan optimal, sehingga bisa membahayakan kesehatan serta keselamatan anak-anak.

Dari analisis yang dilakukan, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kasus keracunan makanan dalam Program MBG, di antaranya adalah buruknya penerapan standar keamanan pangan, lemahnya pengawasan terhadap penyedia makanan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan tidak memadainya sarana untuk pengolahan serta distribusi makanan. Dari sudut pandang perlindungan hak anak, situasi ini menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar sebagai kelompok yang rentan masih memerlukan perlindungan yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap program yang terkait dengan anak dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak serta standar keamanan pangan yang ada, agar hak anak untuk mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan layak dapat terpenuhi dengan optimal.

Langkah-langkah perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan Program MBG perlu dilakukan melalui penguatan aturan, peningkatan pengawasan keamanan pangan, evaluasi program secara teratur, dan peningkatan koordinasi antara pihak

pemerintah, sekolah, dinas kesehatan, dan penyedia makanan. Selain itu, pendidikan mengenai pentingnya keamanan pangan dan gaya hidup sehat juga perlu diberikan kepada siswa sekolah dasar, para guru, dan masyarakat supaya kesadaran terhadap perlindungan kesehatan anak semakin meningkat. Dengan adanya pengawasan yang memadai, penerapan standar keamanan pangan yang baik, serta kerja sama di antara semua pihak terkait, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat beroperasi dengan aman, efektif, dan mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan serta pendidikan bagi siswa sekolah dasar di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Anut, H., Lengo, K. L., Talumbani, M. D., Toi, M. G. R., & Mas' ud, F. 2025. "PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP DISABILITAS, ANAK, DAN MINORITAS AGAMA Herlina." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 252–270. 10.
- CELIOS. 2025a. "Kasus Keracunan MBG Capai 15 Ribu Pada Januari-November 2025." <https://data.goodstats.id/statistic/kasus-keracunan-mbg-capai-15-ribu-pada-januari-november-2025-fAbJW>.
- CELIOS. 2025b. "No TitleMakan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis: Studi Evaluasi 1 Tahun Program MBG." https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/12/Studi-Evaluasi-1-Tahun-Makan-Tak-Bergizi-Tak-Gratis_2025_CELIOS_.
- Fikri, Abdullah. 2025. "Justicia Sains:JURNAL ILMU HUKUM." *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme Abdullah* 10(November).
- JPPI. 2026. "Ada 1.242 Korban Keracunan MBG Per Januari 2026." <https://www.tempo.co/politik/jppi-ada-1-242-korban-keracunan-mbg-per-januari-2026-2106850>.
- Mas'ud, Fadil, Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, and Maria Anjelina Wesa Totnay, Christafora Caeselia Wunu. 2025. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4(1):68–79. doi:10.47498/constituo.v4i1.4949 .
- Mas'ud. 2019. "JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan." *Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang) Fadil* 4(2):11–19. doi:10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp11-19.

- Mas, Fadil, Eufrasia Claudia Bolo, and Maria Sofiati Siki. 2025. "Analisis Pelanggaran Hak Atas Privasi Dalam Kasus Kebocoran Data Aplikasi PeduliLindungi : Perspektif Hak Asasi Manusia Di Era Digital." 10.
- Nengsih, G., & Sommaliagustina, D. 2025. "PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(3):1–15.
- Ramanisa, Sabilla. 2025. "EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS."
- Restiana. 2025. "Hubungan Peraturan Program Makan Bergizi Gratis Dengan Peran Nutrisionis." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10(2).
- Shientiarizki, Amy, Fajar Rachmad, Dwi Miarsa, and Ahmad Heru Romadhon. 2026. "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(2):5213–35.
- Sumantri, O., & Sinaga, M. R. E. 2024. "PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA." 2(2):306–12.
- Tari, Mas'ud, Sanbret, & Abineno, 2025. 2025. "1." *HAK ASASI MANUSIA DAN TANTANGAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA TIMUR: REFLEKSI ATAS KASUS DISKRIMINASI PEREMPUAN DI KOTA KUPANG* 10.
- Zazili, Ahmad. 2019. "Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28(1):57–70.
doi:10.33369/jsh.28.1.57-70.